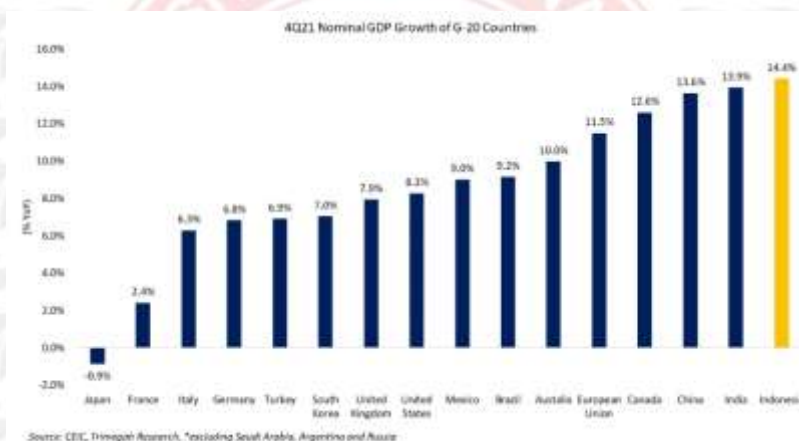


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan UMKM memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UMKM berkontribusi dalam menyediakan kesempatan kerja dan bertindak sebagai pemasok barang dan jasa untuk organisasi besar. Peningkatan kontribusi sektor UMKM terhadap PDB sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM. Produk Domestik Bruto Indonesia tumbuh 0,6% pada kuartal III 2022 dibandingkan kuartal sebelumnya. Perubahan tahun ke tahun dalam PDB adalah 5,9% yang tercatat pada kuartal kedua tahun 2022.



Gambar 1. 1 Nominal GDP Growth of G-20 Countries

Angka PDB pada kuartal ketiga tahun 2022 adalah \$330,477 juta, Indonesia berada di urutan ke-16 dalam peringkat PDB triwulanan (Indonesia GDP, 2022). Kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah gejolak global, menurut edisi terbaru Indonesia *Economic Prospects*. Meskipun inflasi telah meningkat, mencapai 5,7% (YoY) di bulan Oktober, dan harga pangan meningkat sebesar 7,9% (YoY) di bulan September, inflasi diproyeksikan akan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 4,5% (World Bank, 2022).

Menurut World Bank (2022), peningkatan *financial inclusion* dengan nilai satu persen saja, maka pertumbuhan ekonomi bertambah 0,03%. Selain tetap menjaga stabilitas perekonomian di tengah gejolak global, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan dalam mencapai *financial inclusion* yang lebih luas. Menurut Durai & Stella (2019), *financial inclusion* dapat didefinisikan sebagai proses memastikan akses

layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau. *Financial inclusion* juga memiliki manfaat lain seperti penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan tingkat kemiskinan, hingga meminimalisir kesenjangan sosial. *Financial inclusion* yang baik sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, sebagian besar populasi Indonesia masih belum memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan formal. Menurut Durai & Stella (2019), tingkat penetrasi perbankan masih rendah, terutama di daerah pedesaan dan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan meluncurkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memperluas akses ke layanan keuangan. Salah satu inisiatif penting adalah program *financial inclusion*, yang bertujuan untuk memberikan akses ke perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat yang belum terlayani.

Namun, tantangan dalam mencapai *financial inclusion* yang lebih luas masih ada. Beberapa faktor yang mempengaruhi *financial inclusion* di Indonesia meliputi keterbatasan infrastruktur keuangan di daerah pedesaan, tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta rendahnya tingkat *financial inclusion* di kalangan masyarakat (Parsaulian, 2022). Dapat disimpulkan, akses ke layanan *digital financial* juga masih menjadi tantangan bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah dan lembaga keuangan di Indonesia perlu terus bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan *financial inclusion* secara menyeluruh. Menurut Marlina & Rahmat (2018) diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk membangun infrastruktur keuangan yang lebih baik, meningkatkan *financial literacy*, dan memperluas akses ke layanan keuangan formal maupun *digital*. Dengan meningkatnya *financial inclusion*, diharapkan dapat terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Selain upaya meningkatkan *financial inclusion* secara umum, pengembangan teknologi keuangan atau *digital finance* juga menjadi hal penting dalam mendorong *financial inclusion* di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan pertumbuhan yang signifikan dalam adopsi teknologi keuangan, terutama di sektor *digital payment* dan layanan keuangan berbasis aplikasi (Ramli, 2021). Perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru bagi masyarakat

Indonesia, terutama mereka yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Oleh karena itu, *financial inclusion* memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan seperti rekening bank, asuransi, kredit, dan investasi. Sementara itu, *digital financial* merujuk pada penggunaan *technology digital* dalam menyediakan dan mengakses layanan keuangan. Termasuk juga dengan penggunaan aplikasi perbankan, dompet digital, GoPay, OVO, Dana, dan layanan keuangan online lainnya. Melalui aplikasi keuangan digital, pemilik UMKM dapat dengan mudah membuka rekening, melakukan transaksi, dan mengakses layanan keuangan seperti pinjaman online, asuransi, dan investasi. Hal ini memungkinkan untuk mengelola keuangan UMKM dengan lebih efisien dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Di samping itu, perkembangan *digital finance* juga telah memberikan akses ke layanan keuangan kepada sektor UMKM yang sebelumnya sulit memperoleh pembiayaan. Melalui platform *digital finance*, UMKM dapat mengakses pembiayaan alternatif, seperti pinjaman online atau pembiayaan berbasis data, yang dapat membantu dalam pengembangan dan pertumbuhan bisnis. Menurut penelitian Widarwati et al. (2022) menyatakan bahwa dengan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan *financial literacy*, dan melindungi konsumen, Indonesia dapat terus memajukan *financial inclusion* melalui *digital finance*. Sehingga, adanya *digital finance* yang lebih canggih dan akses yang lebih luas, diharapkan masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan potensi penuh dari *financial inclusion* dan memperkuat kinerja keuangan mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada hakikatnya, pengelolaan manajemen keuangan yang baik serta dapat menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Sehingga, kestabilan ekonomi dapat terjaga dengan baik. Adanya pengelolaan keuangan yang baik, memberikan manfaat dalam menunjang keberlangsungan usaha (Rizkiawati, 2018). Falih et.al (2019) menyatakan bahwa keuangan UMKM dikelola dan diinformasikan secara transparan dan akurat akan memberikan dampak positif terhadap UMKM itu sendiri. Jika dapat dicapai oleh setiap bisnis, akan menjadi langkah signifikan untuk mengubah bisnis kecil menjadi bisnis yang lebih besar. Dengan adanya *digital finance* juga membantu UMKM dalam mengelola keuangan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya layanan *digital finance*, UMKM dapat mengakses layanan keuangan yang lebih banyak dan lebih mudah diakses. Selain itu, UMKM juga dapat menggunakan aplikasi layanan keuangan untuk melakukan transaksi secara cepat dan aman, tanpa harus

menggunakan uang tunai. Perwitasari (2022) membuktikan bahwa banyak manfaat dan kemudahan akses layanan *digital finance* yang akan meningkatkan kinerja keuangan dan pertumbuhan bisnis. Namun, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan *digital finance* seperti biaya transaksi, keamanan, dan ketersediaan layanan di wilayah UMKM.

Menurut BPS (2021) dalam Laporan Perekonomian Indonesia menyatakan bahwa penting untuk memahami bahwa perkembangan UMKM di tingkat kota memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Perkotaan di Jawa Timur menjadi pusat kegiatan bisnis dan perdagangan yang memberikan peluang bagi UMKM untuk tumbuh dan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. UMKM di kota-kota Jawa Timur memiliki keberagaman dalam sektor dan skala usaha.

Melalui data kontribusi UMKM dalam perekonomian kota di Jawa Timur, dapat terlihat sejauh mana peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kota. Data tersebut akan menggambarkan persentase kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), lapangan kerja yang dihasilkan, sektor-sektor yang dominan, serta indikator-indikator lain yang relevan. Dengan memahami data ini, kita dapat mengenali potensi dan peluang yang dimiliki UMKM dalam mendukung perekonomian kota-kota di Jawa Timur dan merencanakan langkah-langkah yang sesuai untuk mendorong pertumbuhan sektor ini di masa depan. Berikut merupakan beberapa kota teratas se-Jawa Timur yang berkontribusi UMKM:

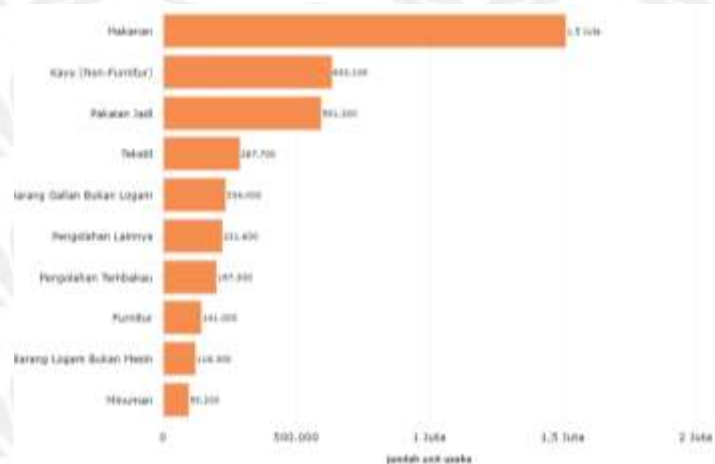
Tabel 1. 1 Data kontribusi UMKM dalam perekonomian di Jawa Timur

No.	Kota	Kontribusi UMKM dalam Perekonomian di Jawa Timur (Triliyun)
1.	Surabaya	283,43
2.	Sidoarjo	106,82
3.	Pasuruan	86,76
4.	Gresik	74,81
5.	Malang	69,87

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Dari tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kota dengan kontribusi UMKM dalam perekonomian terbanyak adalah Surabaya, kedua yaitu Sidoarjo. Pengambilan lokasi penelitian di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan salah satu daerah yang menjadi pusat UMKM di Indonesia dan menjadi sorotan Nasional karena keberhasilannya dalam membina koperasi dan UMKM menjadikan Sidoarjo ditetapkan sebagai kota UMKM Indonesia (Desika Karinayah, 2018). Salah satu contoh UMKM yang menonjol di Sidoarjo adalah kerajinan tas kulit yang berada di Kecamatan Tanggulangin. Sementara itu, info terkini UMKM kembali mengharumkan nama baik Kabupaten Sidoarjo sebab telah ekspor perdana mie telur oleh CV. Indigo Sejahtera (KOMINFO, 2022). Menurut data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, dalam tahun ketahun perkembangan UMKM di Sidoarjo mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hingga saat ini jumlah UMKM di Sidoarjo telah mencapai 150.573 UMKM usaha yang tersebar di 18 kecamatan antara lain adalah di sektor kuliner atau makanan.

Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2019, yang menunjukkan data provinsi dengan jumlah UMK makanan dan minuman terbanyak ditahun 2019 yakni Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama dalam jumlah usaha mikro kecil (UMK) sektor makanan dan minuman terbanyak di Indonesia dengan jumlah mencapai 791.345 UMK. Sementara itu, Provinsi Jawa Timur termasuk didalamnya Kabupaten Sidoarjo yang menempati peringkat kedua dengan jumlah UMK makanan dan minuman yang signifikan dengan jumlah mencapai 746.732 UMK. Provinsi ini juga dikenal dengan kekayaan kuliner tradisionalnya, seperti lontong kupang, rawon, rujak cingur, dan berbagai hidangan lezat lainnya.



Gambar 1. 2 Sektor UMK Terbanyak di Indonesia

(Sumber: Badan Pusat Statistik 2020)

Dari bagan tersebut dapat terlihat mayoritas UMKM yang tersebar antara lain di bidang kuliner atau makanan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha mikro kecil (UMK) sektor makanan di Indonesia mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya sektor makanan dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro kecil (UMK) di sektor makanan merupakan salah satu pilar utama dalam industri UMK di negara ini. Usaha mikro kecil dalam sektor makanan mencakup berbagai jenis usaha seperti warung makan, kafe, pedagang kaki lima, produsen makanan ringan, dan berbagai bentuk usaha kuliner lainnya. Tingginya jumlah ini menunjukkan adanya potensi besar dalam sektor makanan untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan dan minuman di Kabupaten Sidoarjo.

Keberhasilan Kabupaten Sidoarjo sebagai kota UMKM di Indonesia tidak lepas dari laporan kinerja keuangan pada UMKM yang dilakukan oleh pemerintah terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo. Pentingnya laporan kinerja keuangan dalam suatu usaha meliputi pengetahuan tentang perkembangan usaha serta manfaat penunjang usaha (Santiago & Estiningrum 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian agar menunjang pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Gunawan et al. (2023) dan Wanasida et al. (2021), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menganalisis adanya penggunaan pembayaran digital serta pengaruh *financial inclusion* terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Medan dengan mengidentifikasi apakah penelitian ini mampu mempengaruhi *financial inclusion*, *digital finance*, dan *financial literacy* bagi UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dewi & Setiyono (2022), Jannah & Setiyono (2021) dan Nugraha et al., (2019) menilai bahwa tingkat *financial literacy* pemilik UMKM di Kabupaten Sidoarjo masih rendah serta tidak merata, oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Financial Inclusion*, *Digital Finance*, dan *Financial Literacy* Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Financial Inclusion*, *Digital Finance* dan *Financial Literacy* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah *Financial Inclusion* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah *Digital Finance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?
4. Apakah *Financial Literacy* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Inclusion*, *Digital Finance* dan *Financial Literacy* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Inclusion* terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo ?
3. Untuk menganalisis pengaruh *Digital Finance* terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo ?
4. Untuk menganalisis pengaruh *Financial Literacy* terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Kabupaten Sidoarjo ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi kepentingan praktis, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi bermanfaat serta gagasan bagi perkembangan keilmuan mengenai *Financial Inclusion*, *Digital Finance* dan *Financial Literacy* serta dapat meningkatkan kemampuan dalam kinerja keuangan terutama di kalangan UMKM. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti tentang *Financial Inclusion*, *Digital Finance* dan *Financial Literacy* terhadap Kinerja Keuangan UMKM.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemilik UMKM, baik yang sudah memiliki UMKM maupun yang akan menjalankan usaha, untuk mengetahui faktor-faktor terhadap pengelolaan kinerja keuangan yang tepat berdasarkan *Financial Inclusion*, *Digital Finance* dan *Financial Literacy*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam mempertimbangkan *Financial Inclusion*, *Digital Finance*, dan *Financial Literacy* terhadap Kinerja Keuangan UMKM sehingga untuk mencapai Kinerja Keuangan UMKM yang baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.